

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini salah satu penggerak perekonomian di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena memiliki peranan yang sangat penting dalam menyumbang kemajuan dan perkembangan dalam negeri untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Modal utama dalam mengembangkan usaha UMKM adalah bergantungnya keberadaan UMKM yang kreatif, handal, dan kuat (kuat dalam artian kuat dalam menghadapi persaingan UMKM). Banyaknya Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia adalah dengan memanfaatkan dan menciptakan wirausaha serta menciptakan tenaga kerja yang melimpah dan berkompeten.

Penduduk di Indonesia memanfaatkan peluang tersebut dengan memanfaatkannya dalam berwirausaha, seperti bergerak di bidang fashion, jasa, kuliner, dan lain sebagainya. UMKM sendiri banyak didirikan oleh penduduk dari semua golongan terutama dalam golongan menengah kebawah karena dalam berwirausaha dapat didirikan tanpa harus memiliki modal yang besar, memiliki modal yang minim pun juga dapat memiliki serta mengembangkan usahanya. Serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mengalami pengangguran dan belum memiliki pekerjaan, secara tidak langsung hal ini dapat menunjang dan membantu perekonomian di Indonesia.

Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat ini dalam berwirausaha adalah salah satunya perbankan sebagai penyalur kredit bagi UMKM karena aspek keuangan yang digunakan tidak dapat menunjang dalam penyaluran kredit oleh pihak bank karena tidak sesuai dengan standart keuangan yang sudah ditentukan. Banyak UMKM di Indonesia yang memiliki kendala seperti hal tersebut dalam menjalankan suatu usahanya karena pemilik usaha secara umum hanya menggunakan standar keuangan yang sederhana dan tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait dengan adanya penerapan sistem keuangan yang memadai.

Secara umum UMKM hanya memiliki informasi akuntansi sederhana karena mayoritas pemilik UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga

terjadi kesulitan dalam mengukur kinerja perusahaan. Dengan terkait adanya laporan keuangan tersebut sangat bermanfaat dalam membantu UMKM untuk pengambilan keputusan dalam mengelola usaha. Menurut Lidya (2014), rendahnya praktek akuntansi pada UMKM di Indonesia disebabkan karena latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan bagi UMKM. Satyo (2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Menurut Pinasti (2007), Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM adalah bagaimana cara untuk mendapatkan hasil laba atau keuntungan yang banyak tanpa repot untuk menerapkan standar akuntansi dalam keuangannya.

Peraturan yang mewajibkan UMKM untuk melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi dalam usahanya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah ketetapan peraturan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di dalam pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya dipertegas pada pasal 49 menyatakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha. Meskipun pemerintah sudah menetapkan peraturan dan pencatatan akuntansi namun masih banyak pemilik UMKM tidak melakukan pembukuan atau pencatatan dalam kegiatan usahanya. Rumitnya proses akuntansi yang dianggap bahwa laporan akuntansi bukanlah hal yang penting serta keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM yang menyebabnya banyaknya UMKM tidak melakukan pencatatan dan pembukuan sesuai standar yang berlakud dan sudah ditetapkan. UMKM seringkali mengalami kendala untuk mengembangkan usahanya.

Penerapan SAK-EMKM memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan *overload* (memberatkan) bagi UMKM. UMKM memiliki beberapa alasan yang diungkapkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pembukuan, harus

menyiapkan sumber daya manusia khusus yang paham mengenai pembukuan dan pembuatan laporan keuangan, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara pengeluaran operasional kegiatan usaha dengan pengeluaran pribadi pemilik usaha dan adanya tambahan dana secara tiba-tiba yang harus dikeluarkan. Dengan adanya SAK-EMKM dapat menjadi langkah awal untuk mensosialisasikan SAK-EMKM yang kemudian bisa dipraktekkan dan diterapkan untuk menjadi Standar akuntansi yang bisa berterima oleh masyarakat umum. Harapannya agar para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM ) dapat memahami dalam penyusunan dan data diterapkan dalam usahanya.

Maka dalam dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, kecil dan Menengah (SAK-EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada 5 UMKM di Kota Malang)”.

## **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah yang dapat diambil oleh peneliti adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UMKM di Kota Malang telah menerapkan SAK-EMKM?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UMKM di Kota Malang belum menerapkan SAK-EMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM di Kota Malang telah melakukan penerapan SAK-EMKM.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM di Kota Malang belum melakukan penerapan SAK-EMKM.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

### **1.4.1. Bagi UMKM**

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan bagi UMKM dapat memberikan manfaat kepada para pemilik UMKM untuk menyusun laporan keuangan serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk menunjang keberlangsungan suatu UMKM itu sendiri dan sebagai bahan masukan mengenai pemahaman SAK-EMKM.

### **1.4.2. Bagi Akademis**

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk dilaksanakannya pendampingan UMKM di Kota Malang dalam penerapan SAK-EMKM.

### **1.4.3. Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti, sebagai media pembelajaran dalam meneliti dan tambahan pengetahuan tentang penerapan SAK-EMKM untuk menyusun laporan keuangan yang benar.

### **1.4.4 Bagi Pemerintah**

Dengan adanya penelitian, peneliti mengharapkan dapat menjadi referensi dari proses pengambilan keputusan serta dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di Kota Malang sendiri dengan adanya UMKM.